

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **I.1 Latar Belakang**

Pada saat ini di era globalisasi, perkembangan teknologi informasi di dalam sebuah organisasi dapat menjadi solusi untuk mendukung aktivitas dan pengelolaan informasi dalam sebuah organisasi. Dengan adanya teknologi informasi dapat menunjang peran bisnis dan membantu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seluruh organisasi yang akan menerapkan dan atau memperbaharui teknologi untuk kedepannya tentu memerlukan arsitektur enterprise. *Enterprise Architecture* (EA) adalah pendekatan berbasis data dan bisnis untuk membangun arsitektur perusahaan yang dikembangkan oleh Steven H. Spewak. EA juga bisa disebut penjelasan tentang tujuan dari para pemangku kepentingan yang mencakup informasi, fungsionalitas, lokasi organisasi, dan parameter kinerja (Yunis, 2009). Tujuan perencanaan arsitektur enterprise adalah sebagai pedoman dalam pengembangan IT dikemudian hari agar IT tersebut bisa mendukung dari tujuan bisnis (Zaenal Arifin, 2022).

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) merupakan salah satu dari lembaga pemerintahan. Untuk mewujudkan layanan yang cepat dan berkualitas dalam pemerintahan diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan Pasal 1(1) Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah instansi pemerintah yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE. Penilaian perlu dilakukan agar diperoleh nilai indeks SPBE yang merepresentasikan maturitas (*maturity level*). Kegiatan evaluasi SPBE dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Daerah, yang paling kurang mencakup Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE dan Kebijakan SPBE (Reformasi, 2022).

Penelitian tugas akhir ini mengambil objek penelitian pada lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) di Provinsi DKI Jakarta. BPKD adalah organisasi daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Sebagai Pejabat Pengelola Barang berada di bawah Bupati dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Bupati. BPKD mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan negara di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas-tugas lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang dikeluarkan oleh gubernur negara. Berdasarkan tugas dan layanan tersebut, BPKD memiliki sasaran dalam meningkatkan kualitas layanan yang cepat dan berkualitas. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan fungsi tersebut seharusnya dibutuhkan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi untuk mendukung layanan bisnis (TUBA, 2022).

Semakin berkembangnya IT di BPKD DKI Jakarta, membuat kompleksitas pengelolaan teknologi semakin rumit. Penggunaan teknologi informasi yang beragam dalam SPBE memerlukan integrasi yang menyeluruh antara berbagai sistem dan aplikasi yang ada sesuai dengan pedoman SE Menteri PAN-RB No. 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Hal ini menyebabkan perluasan domain aplikasi dan interaksi antar sistem yang semakin kompleks sesuai dengan visi dan misi serta tujuan yang ada pada RPJMD DKI Jakarta .

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis *Enterprise Architecture* yang sesuai untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta ?.
2. Bagaimana perancangan *Enterprise Architecture* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada domain aplikasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta ?.

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisis kondisi eksisting *Enterprise Architecture* pada domain aplikasi yang sesuai untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta.

2. Menyusun rancangan *Enterprise Architecture* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada domain aplikasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta.

#### **I.4 Batasan Penelitian**

Batasan penelitian dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Perancangan *Enterprise Architecture* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berfokus pada domain aplikasi yang berkaitan dengan penelitian lain dengan judul ANALISIS DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA DOMAIN BISNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) PROVINSI DKI JAKARTA.
2. Perancangan *Enterprise Architecture* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menggunakan *framework* TOGAF pada tahap *Preliminary Phase* dengan *output Principle Catalog, Architecture Vision* dengan *output Stakeholder Map Matrix* dan *Value Chain Diagram*, Arsitektur Aplikasi dengan *output Application Architecture Requirement, Application Portofolio Catalog, Application Use Case Diagram* dan *Application Communication Diagram*.
3. Pada Perancangan *Enterprise Architecture* dalam penelitian ini tidak ada keterkaitan dengan domain layanan karena hanya berfokus pada domain bisnis, data dan aplikasi

#### **I.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi perusahaan/instansi, penelitian tugas akhir ini bermanfaat untuk menghasilkan sebuah usulan rancangan *Enterprise Architecture* pada domain aplikasi di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta.
2. Penelitian ini dapat bermanfaat kepada para peneliti lain untuk memberikan suatu rancangan *Enterprise Architecture* pada suatu instansi pemerintahan berbasis elektronik.